

# SIARAN PERS

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALBAR



## PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALBAR TAHUN ANGGARAN 2018

Pontianak, Senin (27 Mei 2019) Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, dengan memperhatikan kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini, Senin 27 Mei 2019 telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan, yang diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara I **Dr. Heru Kreshna Reza** didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat **Joko Agus Setyono** dalam Sidang Paripurna Istimewa bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 yang diserahkan kepada DPRD dan kepada Gubernur Kalimantan Barat terdiri dari tiga laporan yaitu LHP atas LKPD Tahun 2018, LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua. Jumlah laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, diketahui bahwa pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018, anggaran Belanja disajikan sebesar Rp4,69 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,38 triliun, dan anggaran Belanja Transfer disajikan sebesar Rp739,014 miliar dengan realisasi sebesar Rp961,408 miliar. Dalam pelaksanaannya diketahui terdapat pergeseran yang mengakibatkan realisasi belanja melampaui anggaran belanja yang ditetapkan dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD TA 2018. Realisasi belanja melampaui anggaran tersebut **bersifat material dan mempengaruhi penyajian laporan keuangan, yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp296,63 miliar, dan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp262,85 miliar.** Pergeseran

**Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalbar**

Jl. Ahmad Yani, Pontianak Telp. (0561) 585349 ext. 205

Website: pontianak.bpk.go.id, Email: bpkpontianak@gmail.com

anggaran yang tidak ditetapkan dalam Perda Perubahan APBD TA 2018, dan realisasi belanja yang melampaui anggaran, **tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan**.

Atas dasar tersebut, BPK RI memberikan opini **"Wajar Dengan Pengecualian"** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2018, komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan, dan dalam melakukan perubahan penjabaran APBD, perlu memedomani ketentuan yang berlaku, serta lebih optimal dalam berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

Harapan BPK, DPRD, sesuai dengan kewenangannya dapat membantu tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi agar kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan, dan masalah yang sama tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya.

BPK mengapresiasi usaha-usaha perbaikan yang telah, dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018, yang sebagian besar sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Gubernur Kalimantan Barat. Namun, masih ada yang perlu ditingkatkan agar terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan, dan pada tahun 2019 opininya dapat kembali menjadi WTP. BPK RI akan tetap mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistematis dan konsisten.

BPK RI, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah mendukung upaya BPK RI dalam menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Ucapan terima kasih juga BPK sampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah se-Provinsi Kalimantan Barat yang telah mendukung pelaksanaan pemeriksaan LKPD Provinsi Kalimantan Barat TA 2018.

BPK RI berharap semoga Laporan Hasil Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan, baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018, maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK.